

Peran Guru PGMI Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Pendidikan Dasar: Library Research

¹Lathifah, ²Anwar Sidik

¹Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Institut Sains Al-Qur'an Syekh Ibrahim, Indonesia

²Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Institut Sains Al-Qur'an Syekh Ibrahim, Indonesia

Co. Author Email: lathifah41918@gmail.com

Article Info	Abstrak
<p>Article History Received: 5 May 2026 Revised: 18 May 2026 Published: 31 May 2026</p> <hr/> <p>Keywords Anti-Corruption; PGMI; Character Education</p>	<p><i>Penanaman nilai-nilai anti korupsi pada pendidikan dasar merupakan upaya strategis dalam membentuk karakter peserta didik sejak dini. Namun, dalam berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi pendidikan anti korupsi di sekolah dasar masih cenderung bersifat konseptual dan belum terintegrasi secara optimal dalam praktik pembelajaran kontekstual. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep pendidikan anti korupsi dengan implementasinya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran guru PGMI dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada pendidikan dasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis library research. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru memiliki peran multidimensional sebagai pendidik, teladan, dan fasilitator dalam proses internalisasi nilai. Nilai-nilai yang ditanamkan meliputi kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, keadilan, dan kepedulian sosial. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan bahan ajar kontekstual, kurangnya pelatihan guru, serta belum optimalnya integrasi nilai dalam kurikulum. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan, pengembangan bahan ajar berbasis kasus, serta integrasi nilai anti korupsi secara sistematis dalam kurikulum pendidikan dasar.</i></p> <p>Abstract <i>The integration of anti-corruption values in primary education is a strategic effort to shape students' character from an early age. However, previous studies indicate that the implementation of anti-corruption education remains largely conceptual and has not been optimally integrated into contextual learning practices. This condition reflects a gap between the conceptual framework and its practical application in schools. This study aims to analyze the role of PGMI teachers in instilling anti-corruption values in primary education. This research employs a qualitative approach using a library research design. Data were collected from academic journals, books, and policy documents and analyzed using content analysis techniques. The findings reveal that teachers play multidimensional roles as educators, role models, and facilitators in the internalization process. The values emphasized include honesty, responsibility, discipline, justice, and social awareness. However, implementation still faces</i></p>

several challenges, such as limited contextual teaching materials, lack of continuous professional training, and suboptimal curriculum integration. Therefore, this study recommends strengthening teacher competencies through continuous training, developing case-based learning materials, and systematically integrating anti-corruption values into the primary education curriculum.

Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Lathifah, L., & Sidik, A. (2026). Peran Guru PGMI Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Pendidikan Dasar: Library Research. *Journal of Education and Innovation Advancement*, 2(1), 1-9. <https://doi.org/10.64616/edunova.v2i1.104>

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan kompleks yang hingga saat ini masih menjadi tantangan serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dampak korupsi tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, tetapi juga berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi serta melemahnya nilai-nilai moral dalam kehidupan sosial. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024) menunjukkan bahwa sektor pendidikan masih tidak sepenuhnya bebas dari praktik korupsi, baik dalam bentuk penyalahgunaan anggaran, pungutan liar, maupun praktik tidak jujur dalam proses akademik. Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi pada level birokrasi tinggi, tetapi juga dapat merambah ke lingkungan pendidikan sebagai ruang pembentukan karakter generasi muda (Anwar, 2021).

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan preventif melalui pendidikan. Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk nilai, sikap, dan perilaku individu sejak dini, sehingga menjadi sarana penting dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik. Dalam konteks ini, pendidikan anti korupsi diharapkan mampu membangun kesadaran moral serta membentuk karakter yang berintegritas sejak usia sekolah dasar (Kusumawati et al., 2024).

Pendidikan dasar merupakan fase yang sangat penting dalam membentuk karakter peserta didik karena pada tahap ini individu mulai mengembangkan nilai moral, sikap, serta kebiasaan yang akan mempengaruhi perilaku mereka di masa depan. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai anti korupsi dalam pendidikan dasar menjadi langkah strategis dalam membangun generasi yang berintegritas. Pendidikan karakter yang efektif tidak hanya menekankan pada aspek kognitif, tetapi juga mencakup dimensi afektif dan perilaku yang terintegrasi dalam proses pembelajaran (Hakim et al., 2020).

Dalam implementasinya, guru memiliki peran yang sangat strategis sebagai agen utama dalam proses internalisasi nilai. Guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi pembelajaran, tetapi juga sebagai teladan dan fasilitator dalam membentuk karakter peserta didik. Peran guru sebagai role model menjadi sangat penting karena peserta didik pada usia sekolah dasar cenderung meniru perilaku yang mereka amati dalam lingkungan belajar (Tarsono et al., 2025). Hal ini sejalan dengan teori pembelajaran sosial yang menekankan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh proses observasi dan imitasi terhadap figur yang dianggap signifikan.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kualitas hubungan antara guru dan peserta didik memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan moral dan perilaku siswa. Guru yang mampu membangun komunikasi yang positif, jujur, dan bertanggung jawab akan memberikan dampak yang kuat terhadap internalisasi nilai-nilai karakter. Penelitian yang

dilakukan oleh Löper dan Hellmich (2024) menunjukkan bahwa hubungan interpersonal yang baik antara guru dan siswa berkontribusi pada peningkatan perilaku etis peserta didik dalam konteks pembelajaran.

Meskipun pendidikan karakter telah banyak dikaji, implementasi pendidikan anti korupsi di sekolah dasar masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran masih bersifat konseptual dan belum sepenuhnya kontekstual, sehingga nilai yang diajarkan belum terinternalisasi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari peserta didik (Susanti et al., 2025). Selain itu, keterbatasan bahan ajar yang relevan serta kurangnya pelatihan guru menjadi faktor hambatan dalam implementasi pendidikan anti korupsi. Kondisi ini menyebabkan guru mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi ke dalam pembelajaran yang bermakna dan kontekstual. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa kurangnya inovasi dalam strategi pembelajaran turut memengaruhi rendahnya efektivitas pendidikan anti korupsi di sekolah dasar (Sumaryati et al., 2022).

Sebagai respons terhadap berbagai kendala tersebut, beberapa penelitian mulai mengembangkan pendekatan pembelajaran yang lebih inovatif. Di sisi lain, beberapa studi telah mengembangkan pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman, seperti penggunaan studi kasus dan pembelajaran kontekstual, yang terbukti lebih efektif dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik untuk memahami nilai secara lebih mendalam karena mereka terlibat langsung dalam proses pembelajaran (Suwastika et al., 2025). Namun demikian, implementasi pendekatan tersebut masih belum merata di berbagai institusi pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara konsep pendidikan anti korupsi dengan praktik implementasinya di lapangan, khususnya dalam konteks pendidikan dasar. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai peran guru dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi agar dapat menghasilkan strategi pembelajaran yang lebih efektif dan kontekstual.

Pendekatan pendidikan karakter berbasis nilai keagamaan, khususnya nilai-nilai Qur'ani, juga menunjukkan relevansi yang kuat dalam membentuk karakter peserta didik yang berintegritas. Nilai kejujuran, tanggung jawab, dan adab yang terkandung dalam ajaran Al-Qur'an menjadi fondasi penting dalam membangun perilaku antikoruptif sejak dini (Afriani & Syamzaimar, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran guru PGMI dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada pendidikan dasar. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk implementasi serta kendala yang dihadapi dalam proses internalisasi nilai. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pendidikan karakter serta menjadi referensi bagi guru dan pemangku kebijakan dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif dan kontekstual dalam pendidikan anti korupsi di sekolah dasar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan tersebut dipilih untuk menganalisis secara mendalam berbagai konsep, teori, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pendidikan anti korupsi dalam konteks pendidikan dasar. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara komprehensif melalui interpretasi terhadap berbagai sumber literatur (Anwar, 2021).

Pemilihan library research didasarkan pada pertimbangan bahwa kajian mengenai peran guru dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi memerlukan analisis konseptual yang kuat serta sintesis dari berbagai hasil penelitian sebelumnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan penelitian, serta hubungan antar konsep dalam literatur ilmiah (Kusumawati et al., 2024).

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, seperti jurnal nasional dan internasional, buku referensi, serta dokumen kebijakan yang relevan. Penelusuran literatur dilakukan melalui platform akademik seperti Google Scholar dengan menggunakan kata kunci yang relevan. Untuk menjaga relevansi dan kebaruan data, sumber yang digunakan dibatasi pada publikasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu 2020 hingga 2026, sehingga data yang dianalisis mencerminkan perkembangan terbaru dalam kajian pendidikan anti korupsi (Sumaryati et al., 2022).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengorganisasi berbagai sumber literatur yang sesuai dengan fokus penelitian. Setiap sumber dianalisis berdasarkan relevansi topik, pendekatan penelitian, serta kontribusinya terhadap pembahasan. Proses ini dilakukan secara sistematis agar data yang diperoleh memiliki validitas konseptual yang kuat dan mampu mendukung analisis secara mendalam (Susanti et al., 2025).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (content analysis) melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, kategorisasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, peneliti menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dikategorikan berdasarkan tema utama, seperti peran guru, penanaman nilai, dan implementasi pendidikan anti korupsi. Data kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan berdasarkan pola hubungan antar data. Proses ini dilakukan secara berulang untuk memastikan konsistensi serta kedalaman interpretasi (Suwastika et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan, ditemukan bahwa peran guru dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi di pendidikan dasar bersifat multidimensional. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi pembelajaran, tetapi juga sebagai teladan dan fasilitator dalam proses internalisasi nilai secara berkelanjutan. Temuan menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan anti korupsi sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang berorientasi pada nilai. Dengan demikian, peran guru menjadi faktor kunci dalam menentukan efektivitas proses penanaman nilai anti korupsi di sekolah dasar. (Kusumawati et al., 2024).

Untuk memperjelas temuan penelitian, disajikan klasifikasi peran guru beserta bentuk implementasi dan nilai-nilai yang dikembangkan dalam proses pembelajaran sebagai berikut:

Tabel 1. Klasifikasi Peran Guru dan Implementasi Nilai Anti Korupsi

No	Peran Guru	Bentuk Implementasi	Nilai yang Dikembangkan
1.	Pendidik	Integrasi dalam materi PKn & PAI	Kejujuran, tanggung jawab
2.	Teladan	Perilaku sehari-hari guru	Disiplin, integritas

3.	Fasilitator	Diskusi, studi kasus, storytelling	Keadilan, kepedulian
----	-------------	------------------------------------	----------------------

Temuan tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, keadilan, dan kepedulian sosial tidak diajarkan secara terpisah, tetapi diintegrasikan dalam berbagai aktivitas pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa proses internalisasi nilai bersifat holistik dan berkelanjutan dalam lingkungan pendidikan dasar (Anwar, 2021).

Pembahasan

Peran Guru PGMI dalam menanamkan Nilai Anti Korupsi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru PGMI memiliki peran yang sangat strategis dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi di pendidikan dasar. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada penyampaian materi pembelajaran, tetapi juga mencakup fungsi sebagai teladan dan fasilitator dalam pembentukan karakter peserta didik. Hal ini sejalan dengan penelitian (Christina Turner et al., 2024; Musso et al., 2020) yang menegaskan bahwa guru merupakan agen utama dalam pembentukan karakter karena memiliki interaksi langsung dan berkelanjutan dengan peserta didik dalam proses pembelajaran.

Pendidikan karakter pada abad ke-21 tidak hanya menekankan pada pemahaman nilai secara kognitif, tetapi juga pada kemampuan peserta didik dalam menerapkan nilai tersebut dalam kehidupan nyata. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran tidak cukup hanya berfokus pada penyampaian materi, melainkan juga harus mampu membentuk sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral. Guru tidak hanya bertugas mengajarkan konsep, tetapi juga membimbing peserta didik dalam menginternalisasikan nilai melalui interaksi dan pengalaman belajar (Berkowitz, 2021).

Peran guru sebagai teladan menjadi sangat penting karena peserta didik pada jenjang pendidikan dasar berada pada tahap perkembangan imitasi yang tinggi. Mereka cenderung meniru perilaku yang diamati dari lingkungan sekitarnya, khususnya dari guru sebagai figur otoritas di kelas. Penelitian (Tarsono et al., 2025) menunjukkan bahwa konsistensi perilaku guru dalam menunjukkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan karakter peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penanaman nilai tidak hanya bergantung pada penyampaian materi, tetapi juga pada keteladanan yang ditunjukkan secara nyata.

Dalam konteks pendidikan berbasis nilai keagamaan, peran guru sebagai teladan menjadi semakin penting karena guru tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai moral yang akan ditiru oleh peserta didik. Keteladanan dalam menunjukkan perilaku jujur, disiplin, dan bertanggung jawab merupakan bagian dari proses internalisasi nilai yang efektif dalam pendidikan karakter. Pendekatan ini sejalan dengan konsep pendidikan berbasis nilai Qur'ani yang menekankan pentingnya figur teladan dalam membentuk karakter anak secara berkelanjutan (Afriani & Syamzaimar, 2025).

Selain itu, peran guru sebagai fasilitator juga memiliki kontribusi penting dalam menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Guru dituntut untuk mampu merancang pembelajaran yang memungkinkan peserta didik terlibat secara aktif dalam memahami nilai-nilai yang diajarkan. Penelitian (Löper & Hellmich, 2024) menunjukkan bahwa hubungan interpersonal yang positif antara guru dan siswa berkontribusi terhadap perkembangan moral serta perilaku etis peserta didik. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa peran guru tidak hanya bersifat instruksional, tetapi juga transformatif dalam membentuk karakter peserta didik secara berkelanjutan.

Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi

Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai anti korupsi yang ditanamkan dalam pendidikan dasar meliputi kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, keadilan, dan kepedulian sosial. Nilai-nilai tersebut tidak diajarkan secara terpisah, melainkan diintegrasikan dalam berbagai aktivitas pembelajaran maupun interaksi sosial di lingkungan sekolah. Proses ini menunjukkan bahwa penanaman nilai dilakukan secara holistik dan berkelanjutan (Anwar, 2021; Husna & Hermina, 2024).

Penanaman nilai-nilai anti korupsi juga dapat diperkuat melalui pendekatan berbasis nilai-nilai Qur'ani yang menekankan aspek moral dan spiritual dalam pembentukan karakter peserta didik. Nilai-nilai seperti kejujuran (shidq), tanggung jawab (amanah), serta adab merupakan prinsip dasar yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan relevan dengan pendidikan karakter di sekolah dasar. Implementasi nilai tersebut dapat dilakukan melalui pembiasaan, keteladanan, serta lingkungan pendidikan yang mendukung internalisasi nilai secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter berbasis nilai keagamaan memiliki kontribusi yang signifikan dalam membentuk perilaku peserta didik yang berintegritas (Afriani & Syamzaimar, 2025).

Penguatan pendidikan karakter di Indonesia telah menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan nasional yang menekankan nilai integritas, tanggung jawab, dan kejujuran sebagai fondasi pembentukan karakter peserta didik. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pengembangan moral dan etika peserta didik. Implementasi nilai-nilai tersebut perlu dilakukan secara terintegrasi dalam proses pembelajaran agar peserta didik dapat memahami dan menerapkannya dalam berbagai situasi (Berkowitz, 2021).

Dalam praktiknya, penanaman nilai tidak hanya dilakukan melalui pembiasaan perilaku sehari-hari, seperti kejujuran dalam mengerjakan tugas, tanggung jawab terhadap kewajiban, serta kedisiplinan dalam mengikuti aturan sekolah. Penelitian (Sumaryati et al., 2022) menunjukkan bahwa pendekatan berbasis pengalaman memiliki efektivitas yang lebih tinggi dalam proses internalisasi nilai dibandingkan pendekatan teoritis semata. Hal ini disebabkan karena peserta didik tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mengalami secara langsung penerapan nilai dalam kehidupan sehari-hari.

Namun demikian, hasil analisis juga menunjukkan bahwa penanaman nilai anti korupsi masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah masih dominannya pendekatan pembelajaran yang bersifat konseptual, sehingga nilai-nilai yang diajarkan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku peserta didik. Penelitian Susanti et al., (2024) menunjukkan bahwa kurangnya variasi metode pembelajaran menjadi faktor yang menyebabkan rendahnya efektivitas pendidikan anti korupsi di sekolah dasar.

Selain melalui pembiasaan dan integrasi dalam pembelajaran, penanaman nilai-nilai anti korupsi juga memerlukan pendekatan yang bersifat reflektif dan kritis. Peserta didik tidak hanya perlu mengetahui mana yang benar dan salah, tetapi juga perlu memahami alasan di balik nilai tersebut serta konsekuensi dari setiap tindakan yang diambil. Dalam hal ini, guru berperan penting dalam mendorong peserta didik untuk berpikir kritis terhadap berbagai situasi yang berkaitan dengan kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Proses refleksi ini dapat dilakukan melalui diskusi terbuka, tanya jawab, maupun kegiatan evaluasi diri yang memungkinkan peserta didik untuk mengevaluasi perilaku mereka sendiri (Susanti et al., 2025).

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan faktor lingkungan dalam proses penanaman nilai. Lingkungan sekolah yang tidak konsisten dalam menerapkan nilai-nilai

kejujuran dan kedisiplinan dapat menjadi penghambat dalam proses internalisasi nilai. Misalnya, jika peserta didik melihat adanya ketidaksesuaian antara nilai yang diajarkan dengan praktik yang terjadi di lingkungan sekolah, maka hal tersebut dapat menimbulkan kebingungan serta mengurangi efektivitas pendidikan karakter. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara guru, sekolah, dan seluruh warga pendidikan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pembentukan karakter (Kusumawati et al., 2024).

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Pendidikan Dasar

Implementasi pendidikan anti korupsi di sekolah dasar dilakukan melalui berbagai strategi pembelajaran yang bersifat kontekstual dan partisipatif. Guru mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi ke dalam mata pelajaran, serta menggunakan metode pembelajaran aktif seperti diskusi, studi kasus, dan storytelling. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran (Suwastika et al., 2025). Penggunaan metode studi kasus menjadi salah satu strategi yang efektif dalam membantu peserta didik memahami konsep anti korupsi secara lebih konkret, misalnya melalui analisis situasi sederhana seperti perilaku mencontek atau mengambil hak orang lain. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta menentukan sikap berdasarkan nilai yang telah dipelajari.

Selain itu, jika dilihat dari perspektif empiris, fenomena perilaku tidak jujur pada peserta didik dapat dianggap sebagai bentuk awal dari perilaku koruptif dalam skala kecil. Praktik seperti mencontek, tidak mengerjakan tugas secara mandiri, serta memanipulasi hasil pekerjaan merupakan indikator lemahnya internalisasi nilai kejujuran dan tanggung jawab sejak dini. Dalam konteks ini, pendidikan anti korupsi di sekolah dasar menjadi sangat penting sebagai upaya preventif untuk membentuk karakter peserta didik agar tidak berkembang menjadi perilaku koruptif di masa depan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa korupsi tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk melalui proses pembiasaan perilaku yang menyimpang dari nilai moral (Sumaryati et al., 2022). Jika dikaitkan dengan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi, pendidikan anti korupsi perlu dimulai sejak usia dini karena perilaku koruptif sering kali berakar dari kebiasaan kecil yang dianggap sepele.

Dari sisi implementasi, penggunaan pendekatan berbasis kasus (*case-based learning*) dapat menjadi salah satu strategi yang efektif dalam menanamkan nilai anti korupsi. Melalui pendekatan ini, peserta didik diajak untuk memahami situasi nyata yang berkaitan dengan perilaku tidak jujur, kemudian menganalisis dan menentukan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang telah dipelajari. Penelitian (Suwastika et al., 2025) menunjukkan bahwa metode pembelajaran berbasis pengalaman dan kasus nyata mampu meningkatkan keterlibatan kognitif dan emosional peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa proses internalisasi nilai menjadi lebih mendalam dibandingkan metode ceramah konvensional yang cenderung satu arah.

Selain strategi pembelajaran, penting untuk mempertimbangkan variasi hasil penelitian yang menunjukkan bahwa efektivitas pendidikan anti korupsi juga dipengaruhi oleh budaya sekolah. Beberapa studi menekankan bahwa integrasi nilai dalam pembelajaran formal saja tidak cukup tanpa didukung oleh lingkungan sekolah yang konsisten. Penelitian (Ruan et al., 2020) menunjukkan bahwa sekolah dengan budaya disiplin dan transparansi yang kuat lebih berhasil dalam menanamkan nilai-nilai karakter dibandingkan sekolah yang hanya mengandalkan kurikulum formal. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pendidikan anti korupsi tidak hanya ditentukan oleh metode pembelajaran, tetapi juga oleh lingkungan sosial yang mendukung proses internalisasi nilai secara berkelanjutan.

Dalam konteks yang lebih luas, implementasi pendidikan anti korupsi juga berkaitan erat dengan penguatan budaya sekolah berbasis integritas. Lingkungan sekolah yang positif dapat menjadi media efektif dalam memperkuat penanaman nilai, karena peserta didik belajar tidak hanya melalui pembelajaran formal, tetapi juga melalui interaksi sosial sehari-hari. Program seperti kantin kejujuran, sistem penghargaan terhadap perilaku jujur, serta penerapan aturan yang konsisten menjadi contoh konkret dalam membangun budaya anti korupsi di sekolah dasar (Veronika & Dafit, 2022). Selain itu, integrasi nilai dalam kurikulum perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan agar peserta didik dapat memahami relevansi nilai dalam berbagai konteks kehidupan.

Namun demikian, keberhasilan implementasi pendidikan anti korupsi sangat bergantung pada kesiapan dan kompetensi guru. Guru perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsep pendidikan anti korupsi serta kemampuan dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang inovatif dan kontekstual. Tanpa adanya dukungan pelatihan yang memadai, guru akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan nilai secara efektif. Selain itu, dukungan kebijakan pendidikan juga memiliki peran penting dalam memperkuat implementasi, baik melalui integrasi nilai dalam kurikulum, penyediaan bahan ajar, maupun pelatihan berkelanjutan bagi guru. Dengan adanya dukungan sistem yang kuat, implementasi pendidikan anti korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab individu guru, tetapi menjadi bagian dari sistem pendidikan secara keseluruhan.

Dengan demikian, implementasi pendidikan anti korupsi memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai teladan dan fasilitator dalam membentuk karakter peserta didik. Selain itu, keterkaitan antara pembelajaran di kelas dengan realitas sosial perlu diperkuat agar peserta didik memahami konsekuensi dari perilaku tidak jujur dalam kehidupan nyata. Lingkungan sekolah yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin akan memberikan pengaruh signifikan terhadap proses internalisasi nilai. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara guru, sekolah, dan sistem pendidikan untuk memastikan bahwa nilai-nilai anti korupsi dapat tertanam secara optimal dalam diri peserta didik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran guru PGMI dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap pembentukan karakter peserta didik pada jenjang pendidikan dasar. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi pembelajaran, tetapi juga sebagai teladan dan fasilitator yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dalam mendukung proses internalisasi nilai secara berkelanjutan. Peran tersebut diwujudkan melalui integrasi nilai-nilai anti korupsi dalam kegiatan pembelajaran, pembiasaan perilaku sehari-hari di lingkungan sekolah, serta penggunaan metode pembelajaran aktif yang melibatkan peserta didik secara langsung dalam proses pembelajaran.

Nilai-nilai yang ditanamkan meliputi kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, keadilan, dan kepedulian sosial yang berfungsi sebagai fondasi utama dalam membentuk perilaku antikoruptif sejak usia dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran yang bersifat kontekstual dan partisipatif lebih efektif dalam membantu peserta didik memahami serta menginternalisasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan anti korupsi tidak hanya ditentukan oleh materi yang diajarkan, tetapi juga oleh strategi pembelajaran, keteladanan guru, serta lingkungan belajar yang mendukung penerapan nilai secara nyata.

Dengan demikian, tujuan penelitian yang berfokus pada analisis peran guru PGMI serta implementasi pendidikan anti korupsi dalam pendidikan dasar telah terjawab secara komprehensif. Penelitian ini juga berhasil mengidentifikasi bahwa implementasi nilai-nilai anti korupsi dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti integrasi dalam mata pelajaran, pembiasaan perilaku, serta penggunaan metode pembelajaran berbasis pengalaman yang mendorong keterlibatan aktif peserta didik.

Meskipun demikian, pelaksanaan pendidikan anti korupsi masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan bahan ajar yang kontekstual, kurangnya pelatihan berkelanjutan bagi guru, serta belum optimalnya integrasi nilai dalam kurikulum yang berlaku. Selain itu, dukungan dari pihak sekolah dan lingkungan sekitar juga menjadi faktor penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi pendidikan anti korupsi. Tanpa adanya konsistensi antara nilai yang diajarkan dan praktik yang terjadi di lingkungan sekolah, proses internalisasi nilai cenderung tidak berjalan secara optimal.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis dan berkelanjutan melalui penguatan kompetensi guru, pengembangan bahan ajar yang relevan dan kontekstual, serta integrasi nilai anti korupsi secara lebih terstruktur dalam sistem pendidikan dasar. Upaya kolaboratif antara guru, sekolah, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung pembentukan karakter peserta didik yang berintegritas. Dengan langkah tersebut, diharapkan pendidikan anti korupsi tidak hanya menjadi wacana, tetapi mampu memberikan dampak nyata dalam membentuk generasi yang berkarakter dan berintegritas di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani & Syamzaimar. (2025). Implementasi Nilai-Nilai Al-Qur'an dalam Pendidikan Karakter Anak. *QAZI: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 142–148. <https://doi.org/10.61104/qz.v1i2.310>
- Anwar, C. (2021). Strategi Pendidikan Anti Korupsi pada Jenjang Sekolah Dasar. *ASANKA : Journal of Social Science and Education*, 2(2), 195–202. <https://doi.org/10.21154/asanka.v2i2.2990>
- Berkowitz, M. W. (2021). *PRIMED for Character Education: Six Design Principles for School Improvement* (1st ed.). Eye on Education. <https://doi.org/10.4324/9781351030267>
- Christina Turner, Ian Harum Prasasti, Yasmika Baihaqi, & Widi Andewi. (2024). The Role of The Teacher as a Model in Forming Character Education in Primary School Students. *International Journal of Education, Culture and Technology*, 1(1), 47–52. <https://doi.org/10.69747/edu-ij.v1i1.53>
- Hakim, L., Anwar, M. K., Kurniawan, R. Y., & Pahlevi, T. (2020). Integrating sharia economics into the high school economics curriculum. *International Journal of Instruction*, 13(4), 117–132. <https://doi.org/10.29333/iji.2020.1348a>
- Husna, N., & Hermina, D. (2024). Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Dasar. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2(3), 1963–1972. <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i3.845>